

HUBUNGAN IMPLEMENTASI BIAYA PENDIDIKAN GRATIS DENGAN MINAT BELAJAR SISWA

Asis Wolio¹, Ummu Saidah², La Rajab³

¹SMA LKMD Olas, Lokki, Huamual Belakang, Maluku, Indonesia

^{2,3}IAIN Ambon, Jl. Dr. H. Tarmizi Taher, Jalan Kebun Cengkeh, Maluku, Indonesia

Email: andrefirman835@gmail.com

Article History

Received: 13-11-2021

Revision: 11-12-2021

Accepted: 25-12-2021

Published: 30-12-2021

Abstract. One of the efforts to implement improvements in the field of education is to implement the school policy of Providing cheap and easy education for the people which means that education must be organized for the people which must be easy to follow or reach for all people. This study aims to determine the relationship between the implementation of free education costs and students' interest in learning. Subject 6 students 1 teacher. Data were collected through observation, interviews, and documentation. This research uses research types in the form of data grouping, data reduction, and data interpretation. The results of this study found that the implementation of free education fees is very helpful for students in learning when at school or at home. With free tuition fees students can concentrate in studying and diligently to go to school. In addition, students' interest in learning is very good, this can be seen in the learning process and students' enthusiasm to know and understand well the material presented by the teacher in class.

Keywords: Free Education, Interest in Learning

Abstrak. Salah satu usaha untuk melaksanakan perbaikan dalam bidang pendidikan tersebut adalah dengan pelaksanaan kebijakan sekolah Menyediakan pendidikan murah dan mudah bagi rakyat yang berarti pendidikan harus diselenggarakan untuk rakyat yang harus mudah diikuti atau dijangkau untuk semua rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan implementasi biaya pendidikan gratis dengan minat belajar siswa. Subjek 6 orang siswa 1 orang guru. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian berupa pengelompokan data, reduksi data, dan interpretasi data. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemberlakuan biaya pendidikan gratis sangatlah membantu siswa dalam belajar ketika di sekolah maupun di rumah. Dengan Biaya pendidikan gratis siswa dapat berkonsentrasi dalam belajar dan rajin untuk berangkat ke sekolah. Selain itu, minat belajar siswa dalam proses pembelajaran sangatlah baik, hal ini terlihat dalam proses pembelajaran dan antusias siswa untuk mengetahui dan memahami dengan baik materi yang disampaikan oleh guru di kelas.

Kata Kunci: Pendidikan Gratis, Minat Belajar

How to Cite: Wolio, A., Saidah, U., & Rajab, L. (2021). Hubungan Implementasi Biaya Pendidikan Gratis dengan Minat Belajar Siswa. *PEDAGOGIC: Indonesian Journal of Science Education and Technology*, 1 (1), 12-26. <http://doi.org/10.54373/ijset.v1i1.58>

PENDAHULUAN

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar antara guru dengan siswa yang melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan. Unsur-unsur tersebut antara lain guru, siswa, lingkungan, bahan ajar, evaluasi serta media belajar (Airlanda, 2016). Kegiatan belajar mengajar sendiri dilakukan dengan sasaran

agar hasil proses pendidikan tersebut dapat bermanfaat bagi siswa itu sendiri, masyarakat, bangsa dan negara (Anas et al., 2015). Keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor yang bersifat internal dan eksternal. Salah satu faktor yang bersifat eksternal adalah faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah yang dapat berupa lingkungan fisik dan non fisik (Citra, 2017). Lingkungan fisik berupa gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, lapangan, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan non fisik bisa berupa suasana belajar, kondisi fisiologis, pergaulan, dan lain-lain. Hal inilah yang membuat sekolah harus menyediakan kondisi yang sedemikian rupa demi terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien (Airlanda, 2016). Kondisi yang dimaksud adalah tersedianya sarana, alat, media serta lingkungan yang tepat dalam membantu kelancaran serta kemudahan bagi guru untuk menyampaikan materi pada siswa sehingga siswa dapat mentransfer materi tersebut dengan mudah (Anum & Novalia, 2021; Muhdi et al., 2017).

Salah satu penyebab rendahnya partisipasi pendidikan dari masyarakat adalah tingginya biaya pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung seperti iuran sekolah, buku, seragam, alat tulis dan lain-lain. Sedangkan biaya tidak langsung seperti biaya transportasi, biaya kursus, uang saku dan biaya lain-lain (Sadia et al., 2019). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan "Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar". Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh siswa pada tingkat pendidikan dasar (Muhdi et al., 2017).

Sejak tahun 2005, seluruh anak sekolah di Indonesia memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat sebagai dampak dari pengurangan subsidi BBM pada tahun 2005 dan sehubungan dengan penuntasan wajar 9 tahun yang kemudian pemerintah memprogramkan pemberian kompensasi di bidang pendidikan yaitu BOS tersebut (Hamid, 2012). Oleh karena itu, untuk anak-anak SD sudah bisa dikatakan langsung gratis karena dana dari BOS sudah mencukupi. Sehingga sejak tahun 2005 sudah tidak lagi ditarik iuran sekolah, baik SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) maupun BP3 (Badan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan) yang dikelola oleh Komite Sekolah (Wartoyo, 2016).

Salah satu usaha untuk melaksanakan perbaikan dalam bidang pendidikan tersebut adalah dengan pelaksanaan kebijakan sekolah gratis oleh pemerintah kabupaten berdasarkan otonomi daerah (Citra, 2017). Pencanaan program tersebut patut diacungi jempol. Kendati penuh dengan sorotan tajam, namun ini merupakan langkah berani di tengah sulitnya biaya pendidikan diberbagai daerah (Febriyanti, 2016). Usaha Pemerintah kabupaten setempat dalam

melaksanakan program ini adalah menggratiskan biaya pendidikan bagi seluruh siswa dari jenjang dasar sampai menengah. Menyediakan pendidikan murah dan mudah bagi rakyat yang berarti pendidikan harus diselenggarakan untuk rakyat yang harus mudah diikuti atau dijangkau untuk semua rakyat (Haba, 2020).

SMA Negeri 1 Waesala merupakan salah satu sekolah negeri yang menerima dan melaksanakan pendidikan gratis ini karena termasuk di sekolah yang berada wilayah pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilaksanakan sejak tahun 2007 dan kemudian dilanjutkan program dari pemerintah yaitu pendidikan gratis secara nasional (Satrio & Meirinawati, 2016). Pendidikan dasar tingkat SD dan SMP, hingga SMA merupakan jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan berikutnya. Pemanfaatan dana yang diperoleh dari kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan intelektual masyarakat dan memenuhi hak pendidikan serta mewujudkan program wajib belajar pendidikan. Pemberian dana ini berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan pendidikan di SMA Negeri 1 Waesala, namun hingga saat ini walaupun siswa tidak lagi dibebankan biaya sekolah, akan tetapi minat belajar siswa terlihat sangat rendah (Yuliana et al., 2015). Berdasarkan hasil wawancara singkat yang dilakukan oleh peneliti dengan guru mata pelajaran PAI di SMA Negeri 1 Waesala diketahui bahwa dalam mempelajari materi PAI minat belajar siswa sangatlah rendah, sehingga sangat berdampak pada hasil belajar yang diperoleh siswa (Jamaluddin, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan implementasi biaya pendidikan gratis dengan minat belajar siswa

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Waesala yang berjumlah 121 orang siswa. Proses pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling yakni proses pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu (Arikunto, 2010; Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini sampel yang dipilih yaitu 2 orang siswa kelas X, 2 orang siswa kelas XI, 2 orang siswa kelas XII, 1 orang guru, dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Waesala.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal secara langsung yang diperoleh peneliti pada saat melaksanakan penelitian (Arikunto, 2012). Data tersebut hasil observasi dan wawancara terhadap sampel penelitian tentang implementasi biaya pendidikan gratis dan hubungannya dengan minat belajar siswa. Data sekunder adalah data yang berasal dari kajian literatur yang relevan dengan penelitian ini. Data tersebut dapat berupa laporan-laporan, jurnal, maupun kajian terdahulu

yang relevan. Data sekunder juga dapat berasal dari hasil wawancara pada masyarakat setempat tentang implementasi pendidikan gratis di SMA Negeri 1 Waesala.

Analisis data merupakan suatu tahap untuk merangkum dan menyederhanakan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni mengacu pada teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing (Sugiyono, 2008). Reduksi data merupakan suatu proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari catatan-catatan di lapangan berupa hasil pengamatan /observasi dan hasil wawancara. Penyajian data merupakan suatu proses lanjutan dari reduksi data. Setelah data direduksi, data tersebut disajikan dalam bentuk uraian singkat, dan terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan suatu proses yang didasarkan pada data yang diperoleh dari reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan didukung dengan data-data yang valid, sehingga kesimpulan yang dikemukakan dapat bersifat akurat.

HASIL

Implementasi Pendidikan Gratis di SMA Negeri 1 Waesala

Pendidikan gratis adalah pendidikan dimana semua lapisan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu dapat melaksanakan kegiatan belajarnya dengan murah dan mudah yaitu mereka tidak harus membayar biaya-biaya yang dikelola oleh sekolah, misalnya uang SPP, uang pengembangan, uang pendaftaran, dan uang buku atau dapat dikatakan tanpa dipungut biaya. Yang dimaksud dengan pendidikan gratis atau sekolah gratis itu adalah orang tua tidak dipungut biaya khususnya biaya operasional, tapi biaya yang dipergunakan siswa harus dibiayai sendiri, misalnya buku, meskipun sudah ada dana buku BOS tetapi masih menggunakan buku pendamping, buku-buku latihan atau LKS, dan seragam sekolah. Tetapi pemahaman dari orang tua yang kurang, karena mereka menganggap yang dimaksud gratis itu adalah biaya secara keseluruhan. Kebijakan pendidikan gratis merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang kemudian di susul pemerintah pusat dengan jalan menaikkan biaya satuan BOS yang sangat signifikan (Suyahman, 2016).

Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa masih banyak anak usia sekolah khususnya di Kabupaten Seram Bagian Barat terutama dari kalangan ekonomi lemah yang belum dapat mengenyam bangku sekolah ataupun yang terpaksa harus

putus sekolah lantaran permasalahan klasik, yaitu tingginya biaya pendidikan sehingga dengan adanya kebijakan ini diharapkan semua anak memperoleh kesempatan untuk bisa sekolah (Wartoyo, 2016). Kemudian komitmen pemerintah yang juga diikuti oleh komitmen pemerintah daerah dalam menyelenggarakan amanat UUD perihal 20% anggaran untuk pendidikan, melaksanakan amanat UUD 45 Pasal 31 serta UU No 20 Tahun 2003. Adapun yang harus dilakukan oleh sekolah yaitu:

Persiapan kebijakan pendidikan gratis

Persiapan yang dilakukan oleh pihak sekolah terutama dalam hal guru, siswa, sekolah dan orang tua. Pihak sekolah tidak henti-hentinya memberikan informasi dan sosialisasi kepada guru, siswa dan orang tua agar mereka tidak kaget dengan adanya kebijakan pendidikan gratis ini. Pihak sekolah harus menerima kebijakan pendidikan gratis ini karena mungkin dalam mengeluarkan biaya harus dipatok di dalam aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan tidak lagi menarik iuran dari komite atau wali murid (Maharani & Sukardi, 2016). Untuk pihak siswa, orang tua dan guru diberi sosialisasi tentang kebijakan pendidikan gratis ini agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa yang dikatakan gratis adalah gratis dalam hal biaya operasionalnya (Yuliana et al., 2015).

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pemerintah, orang tua dan siswa juga mempunyai tanggung jawab terkait dengan biaya satuan pendidikan yang sudah diatur dalam PP No. 48 tahun 2008 yang harus dipahami betul. Intinya adalah bagi pemerintah bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya operasional satuan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah sampai terpenuhinya standar nasional pendidikan (Umar, 2018). Bagi siswa dan orang tua bertanggung jawab atas biaya pribadi siswa misalnya uang saku/ uang jajan, seragam sekolah dan lain sebagainya. Semua itu harus dipahami dan dipersiapkan sedemikian rupa agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian, hal guru, siswa, sekolah dan orang tua dapat memahami bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada dalam buku pedoman pelaksanaannya (Rolos et al., 2022).

Waktu pelaksanaan kebijakan biaya pendidikan gratis

Kebijakan biaya pendidikan gratis merupakan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah khususnya pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat yang dimulai pada tahun 2009. Penyaluran dana program sekolah gratis baik yang bersumber dari pemerintah pusat dilakukan

secara bertahap sesuai dengan ketentuan. Dana (biaya) program gratis diberikan setiap tiga bulan sekali atau setiap triwulan, awal bulan setiap periode. Penyaluran dana dilaksanakan tim manajemen provinsi kepada tim manajemen kabupaten/kota melalui bank pemerintah/pos.

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis pada tahun anggaran 2009 akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2009, yaitu semester 2 tahun ajaran 2008/2009 dan semester 2 tahun ajaran 2009/2010. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan atau triwulan, yaitu periode Januari - Maret, April - Juni, Juli - September dan Oktober - Desember. Penyaluran juga diharapkan dilakukan di bulan pertama setiap triwulannya.

Implementasi kebijakan biaya pendidikan gratis di SMA Negeri 1 Waesala

Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis tersebut diharapkan dapat berjalan dengan lancar setelah semua pihak sudah mampu melaksanakan persiapan-persiapan yang harus dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kebijakan pendidikan gratis adalah untuk menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan atas dari beban biaya operasional sekolah baik di sekolah negeri maupun swasta (Muhdi et al., 2017). Pihak sekolah wajib menggunakan dana yang sudah diterima tersebut untuk pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP), pembelian buku teks pelajaran, biaya ulangan harian dan ujian, serta biaya perawatan operasional sekolah. Sedangkan biaya yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memiliki biaya besar, seperti: *studytour* (karyawisata), studi banding, pembelian seragam bagi siswa dan guru untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), serta pembelian bahan atau peralatan yang tidak mendukung kegiatan sekolah, semuanya tidak ditanggung biaya BOS (Citra, 2017). Dan pemungutan biaya tersebut juga akan tergantung dengan kebijakan tiap-tiap sekolah. Serta tentunya pemerintah akan terus mengawasi dan menjamin agar biaya-biaya tersebut tidak memberatkan para siswa dan orang tua.

Penyaluran dana program pendidikan gratis pada mulanya dilakukan oleh tim manajemen provinsi, kabupaten/kota dengan mengajukan surat penyediaan dana (SPD) ke biro/bagian keuangan sekretaris provinsi/ kabupaten/kota sesuai ketentuan. Setelah SPD terbit, tim manajemen provinsi/ kabupaten/kota mengajukan surat permohonan pembayaran langsung dana sekolah gratis sesuai kebutuhan (Anum & Novalia, 2021). Dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota melakukan verifikasi, kemudian menerbitkan surat perintah membayar langsung. Surat itu ditujukan kepada biro/bagian keuangan Setda provinsi, kabupaten/kota. Biro/ bagian keuangan Setda provinsi, kabupaten/kota melakukan verifikasi. Kemudian

menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada rekening kas daerah. Selanjutnya, dana sekolah gratis yang telah dicairkan dari biro/bagian keuangan setda provinsi, kabupaten/kota disalurkan ke sekolah/madrasah/ponpes yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi, kabupaten/kota dan lembaga penyalur (Yuliana et al., 2015). Setidaknya ada tiga tim yang mengawasi pelaksanaan sekolah gratis ini yaitu tim manajemen provinsi, tim manajemen kabupaten/kota dan tim manajemen sekolah/madrasah/ponpes.

Penggunaan dana BOS untuk pendidikan gratis menjadi tanggung jawab lembaga yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangannya (Safitri, 2019). Ada beberapa hal yang harus tercantum di dalamnya, diantaranya adalah rencana anggaran dan belanja sekolah. Harus terdapat rincian jenis kegiatan, laporan penerimaan dan pengeluaran dana, buku kas, kemudian disertai dengan bukti yang sah. Semua pembukuannya harus disesuaikan dengan aturan dari pemerintah (Musayyidi, 2020). Dana BOS berasal dari APBN, oleh karena itu ketentuan pelaksanaan keuangan meliputi penyaluran, pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jadi penyusunan laporan pertanggungjawabannya harus disusun secara lengkap dan tertata rapi. Jadi pertanggungjawaban dana harus membutuhkan pengelolaan yang ekstra hati-hati karena dalam menyusun laporan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan peraturan dari pemerintah, karena dana BOS merupakan bagian dari APBN (Suyahman, 2016).

Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Biaya Pendidikan Gratis

Kesulitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban

Kendala ini bersifat intern bagi sekolah terutama bagi pengelola dana BOS dalam menyusun laporan pertanggungjawaban BOS. Hal ini disebabkan karena persepsi yang kurang sesuai dengan aturan yang ada, sehingga kadang dalam penyusunan laporan pertanggungjawabannya terdapat kekeliruan. Kondisi ini ditambah dengan semakin singkatnya waktu penyusunan pertanggungjawabannya. Penyusunannya membutuhkan pemikiran yang teliti dan harus ditambah dengan jangka waktu yang sangat singkat padahal laporan pertanggungjawaban tersebut harus didukung dengan data-data yang lengkap dan jelas. Kepala SMA Negeri 1 Waesala mengungkapkan bahwa dalam penggunaan dana itu sangat dibatasi untuk hal apa saja, padahal kenyataannya banyak pengeluaran yang tidak sesuai dengan batasan-batasan penggunaan dana tersebut dan pertanggungjawabannya juga harus sesuai dengan batasan-batasan yang terdapat dalam aturan di buku pedoman pelaksanaan pendidikan gratis itu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kesulitan dalam laporan pertanggungjawaban merupakan kendala yang utama di dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. Kesulitan ini dapat dipengaruhi karena singkatnya jangka waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban BOS, kurangnya kejelasan tentang pertanggungjawaban pada saat sosialisasi dan penggunaan dana yang sangat dibatasi dengan aturan-aturan yang dalam pembuatan laporan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan batasan yang sudah diatur di dalam buku pedoman.

Keterlambatan pencairan dana

Yang dimaksud dengan keterlambatan pencairan dana disini adalah tidak tepatnya atau kurangnya kepastian tanggal atau waktu penyaluran dana tetapi masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu setiap tiga bulan sekali atau setiap triwulan sekali yang mengakibatkan proses pembelajaran sedikit terlambat karena belum adanya dana yang digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang seharusnya awal periode atau awal triwulan dananya harus sudah cair sesuai dengan aturannya, tetapi kenyataannya pada awal tahun ini yaitu bulan Maret baru dicairkan. Kepala SMA Negeri 1 Waesala menambahkan bahwa terlambatnya pencairan dana tersebut mungkin disebabkan oleh pemerintah dalam membuat rencana APBN. Jadi sekolah harus berusaha meminjam untuk membiayai semua kegiatan yang sudah berlangsung terlebih dahulu.

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa keterlambatan dalam pencairan dana mungkin disebabkan dengan adanya pembuatan RAPBN oleh pemerintah yang di buat pada awal tahun. Oleh sebab itu, maka pihak sekolah harus pandai-pandai berpikir bagaimana yang harus dilakukan agar semua kegiatannya bisa berjalan dengan lancar yaitu salah satunya harus mencari dana talangan terlebih dahulu, padahal pada kenyataannya kadang dana yang di pinjam itu lebih besar daripada dana yang keluar dari pemerintah.

Penurunan pelayanan pendidikan khususnya kegiatan ekstrakurikuler

Anggaran BOS yang diberikan hanya mencukupi biaya operasional akademis, tetapi tidak mencukupi kebutuhan di luar kegiatan akademis. Dana BOS tidak cukup untuk memenuhinya karena terserap penuh untuk kegiatan akademik. Dalam kenyataannya, kegiatan ekstrakurikuler sangat menunjang kegiatan akademik sekolah karena dengan ekstrakurikuler, kualitas sekolah akan terlihat bermutu atau tidak. seperti halnya kegiatan lomba, kualitas sebuah sekolahan akan terlihat disitu. Penurunan layanan kualitas di sekolah tersebut sangat mungkin terjadi mengingat masih banyaknya guru yang belum terjamin kesejahteraannya, apalagi dengan

adanya kebijakan sekolah gratis, guru-guru tidak lagi dimungkinkan menerima insentif khusus dari masyarakat (Febriyanti, 2016).

Menurut Kepala Sekolah kegiatan di luar jam akademik itu sangat banyak macamnya, misalnya kegiatan pramuka, voli, basket, komputer, dan lain-lain yang kesemuanya itu membutuhkan sarana dan prasarana agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Padahal dana BOS yang diberikan itu masih kurang apabila untuk mencukupi semua yang dibutuhkan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi dengan kata lain, pelayanan ekstrakurikuler itu bisa berjalan dengan lancar apabila semua sarana prasarana tercukupi. Untuk mencukupinya sekolahan harus mencari dana yaitu dengan mengajukan proposal kepada pemerintah, tapi kenyataannya menunggu lumayan lama untuk turunnya dana itu dan kegiatan ekstrakurikuler berjalan seadanya terlebih dahulu.

Anggapan masyarakat dengan kebijakan biaya pendidikan gratis adalah gratis sepenuhnya

Pandangan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan gratis ini pada awalnya sangat senang sekali karena membantu seluruh biaya pendidikan, baik operasional maupun non operasional atau pribadi. Jadi mereka menganggap bahwa dengan adanya pendidikan gratis, orang tua sudah tidak membayar semua keperluan di dalam pendidikan anaknya sampai dengan keperluan pribadi siswa seperti seragam sekolah. Padahal yang dimaksud gratis disini adalah mengenai pembiayaan seluruh kegiatan operasional seperti SPP, biaya dari komite atau dana pembangunan, pembiayaan dalam rangka penerimaan siswa baru mulai dari biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, daftar ulang, fotocopy panitia, konsumsi panitia, uang lembur panitia dan lain sebagainya. Begitu pula untuk biaya penunjang kegiatan belajar mengajar mulai dari pembelian buku referensi dan buku teks pelajaran koleksi di perpustakaan.

Menurut kepala sekolah SMA Negeri 1 Waesala bahwa sebagian masyarakat masih belum begitu mengerti dengan seksama apa yang dimaksud dengan pendidikan gratis disini, karena sosialisasi dari pemerintah untuk masyarakat tentang pelaksanaan pendidikan gratis ini serta aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya pandangan yang keliru tentang kebijakan pendidikan gratis itu adalah gratis secara penuh, padahal pendidikan gratis itu ditujukan untuk menggratiskan biaya operasional saja sehingga membantu meringankan biaya pendidikan orang tua. Hal ini disebabkan karena kurang tahunya masyarakat dengan apa yang dimaksud dengan gratis dalam pendidikan gratis disitu.

Upaya yang Dilakukan untuk Menanggulangi Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan Biaya Pendidikan Gratis di SMA Negeri 1 Waesala

Berbagai masalah yang muncul menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di SMA Negeri 1 Waesala sehingga perlu dicari jalan keluarnya agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya yaitu sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Adapun beberapa usaha atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diantaranya:

Kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban

Kesulitan dalam laporan pertanggungjawaban merupakan kendala yang utama di dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. Kesulitan ini dapat dipengaruhi karena singkatnya jangka waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban BOS, kurangnya kejelasan tentang pertanggungjawaban pada saat sosialisasi dan penggunaan dana yang sangat dibatasi dengan aturan-aturan yang dalam pembuatan laporan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan batasan yang sudah diatur di dalam buku pedoman.

Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah terutama bagi pengelola dana BOS dan APBD adalah dengan mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pengawas untuk mendapatkan kejelasan sehingga penyusunan laporan pertanggungjawabannya tidak terjadi kesalahan serta mengadakan diskusi dengan pengelola dana BOS dan APBD dari sekolah lain. Sehingga apabila ada kesalahan akan mudah terdeteksi lebih awal sehingga penyusunan laporan pertanggungjawabannya dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Keterlambatan pencairan dana

Pencairan dana yang tidak tepat biasanya terjadi pada awal periode, yaitu yang seharusnya bulan Januari itu sudah keluar tapi bulan Maret baru terealisasi. Oleh sebab itu, maka pihak sekolah harus mencari dana talangan terlebih dahulu dengan cara mencari pinjaman, misalnya meminjam dana yang dari APBD karena keluarnya kadang tidak bersamaan, tetapi setelah dana BOS di naikkan dana yang dari APBD malah diturunkan, jadi ya masih kurang dan harus mencari dana talangan yang lain untuk membiayai operasional sekolah tersebut. Ditambahkan oleh informan (Kepala Sekolah) bahwa terkadang sekolah juga bingung karena sudah terlanjur menggunakan dana dari pinjaman ternyata dana yang keluar lebih sedikit dari pinjaman tersebut. Tapi memang harus begitu kalau ingin proses pembelajarannya tidak terhambat, karena sumber dana sekolah sekarang hanya mengandalkan dari pemerintah pusat dan daerah

saja. Yang penting semua keperluan yang penting didahulukan dan yang lain ditunda terlebih dahulu sampai dananya sudah ada.

Penurunan pelayanan biaya pendidikan khususnya kegiatan ekstrakurikuler

Anggaran BOS yang diberikan hanya mencukupi biaya operasional akademis, tetapi tidak mencukupi kebutuhan di luar kegiatan akademis. Dana BOS tidak cukup untuk memenuhinya karena terserap penuh untuk kegiatan akademik. Padahal pelayanan ekstrakurikuler itu bisa berjalan dengan lancar apabila semua sarana prasarannya tercukupi. Untuk mencukupinya, sekolah harus mencari dana yaitu dengan mengajukan proposal kepada pemerintah walaupun turunnya dana itu tidak tahu kapan terealisasinya.

Anggapan masyarakat dengan adanya kebijakan pendidikan gratis adalah gratis sepenuhnya

Adanya pandangan yang keliru tentang kebijakan pendidikan gratis yaitu gratis secara penuh juga merupakan kendala yang harus di hadapi sehingga masyarakat itu mengetahui sebenarnya apa yang dimaksud dengan pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah ini. Padahal pendidikan gratis itu ditujukan untuk menggratiskan biaya operasional saja sehingga membantu meringankan biaya pendidikan orang tua. Sehingga pihak sekolah memberikan penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis kepada masyarakat atau orang tua murid sesuai dengan aturan-aturan dalam buku pedoman sehingga mereka paham dan mengerti.

Minat Belajar Siswa SMA Negeri 1 Waesala dengan Adanya Biaya Pendidikan Gratis

Minat belajar siswa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari dalam diri siswa maupun yang berasal dari luar diri siswa diantaranya lingkungan dan fasilitas (Ananda et al., 2022; Asri et al., 2020). Minat belajar dalam diri siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika dalam proses pembelajarannya siswa tidak dibebankan dengan berbagai hal yang dapat mengganggu perkembangan kognitif dan mental siswa tersebut (Maharani & Sukardi, 2016). Selama ini, besarnya biaya sekolah dapat menjadi kendala tersendiri bagi siswa yang memiliki keadaan ekonomi yang tergolong rendah (Kartika et al., 2019). Sebab, siswa tidak dapat belajar dengan baik, jika diperhadapkan dengan biaya sekolah karena dengan beban biaya tersebut secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap tingkat konsentrasi dan keadaan psikologi siswa (Suyahman, 2016).

Oleh karena itu, biaya pendidikan gratis yang telah menjadi program pemerintah melalui penyaluran dana Biaya Operasional Sekolah sangatlah membantu beban orang tua dan siswa sendiri dalam proses pembelajaran (Rolos et al., 2022). Dengan adanya dana BOS maka siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan tenang tanpa ada gangguan dari luar seperti dipanggil oleh guru ketika belum membayar uang SPP dan sebagainya. Hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara dengan salah satu siswa SMA Negeri 1 Waesala bahwa:

“Dengan adanya pemberlakuan biaya pendidikan gratis maka kita dapat belajar dengan tenang dan aktivitas pembelajaran dapat berlangsung dengan baik”.

Senada dengan hal di atas, menurut Adrian Wally bahwa

“Dengan adanya pendidikan gratis saya lebih termotivasi dalam belajar, karena sudah tidak ada beban lagi untuk membayar uang SPP”.

Biaya pendidikan gratis yang saat ini menjadi program andalan pemerintah dalam dunia pendidikan tentulah sangat membantu siswa dalam belajar (Anas et al., 2015). Program tersebut sangatlah membantu para siswa khususnya pada siswa SMA Negeri 1 Waesala yang notabeneanya berada di bawah garis kemiskinan. Sebab, bagi siswa di SMA Negeri 1 Waesala ketika belum diberlakukan dana BOS rata-rata ketika pulang sekolah mereka membantu orang tua untuk bekerja (Haba, 2020; Suyahman, 2016). Dengan adanya program tersebut, maka siswa dapat bebas siswa menjadi sedikit berkurang dalam mencari uang untuk membayar uang sekolah dan dapat belajar dengan baik ketika berada di rumah.

DISKUSI

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang berasal dari realokasi dana subsidi BBM (PKPS-BBM) di bidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain. Dengan BOS diharapkan siswa dapat memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar Sembilan tahun serta menyelesaikan SMA. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimaksud dalam PKPS BBM Bidang Pendidikan ini mencakup komponen untuk biaya operasional non personil. Biaya operasional non personil inilah yang diprioritaskan, bukan biaya kesejahteraan guru dan bukan biaya untuk investasi. Penggunaan Dana BOS harus berpedoman pada panduan pelaksanaan program BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, antara lain mengatur tentang kriteria kegiatan-kegiatan yang boleh dibiayai dana BOS, dan kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dibiayai dari dana BOS.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa proses pembelajaran yang berlangsung di SMA Negeri 1 Waesala berlangsung dengan tertib. Guru ketika menyampaikan proses pembelajaran mampu diserap dengan baik oleh siswa, hal tersebut dikarenakan fasilitas yang cukup memadai dan minat belajar siswa sangatlah tinggi dalam mengikuti proses pembelajaran (Anam, 2015). Hal ini terlihat jelas dalam proses pembelajaran, sebab siswa yang memiliki minat terhadap suatu hal pasti akan memiliki rasa ingin tahu terhadap hal yang diminati (Hayati & Harianto, 2017). Dalam observasi yang diamati, peneliti mendapati bahwa saat dihadapkan pada suatu permasalahan, siswa secara tekun melakukan diskusi kelompok atau mengajukan kepada guru dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang dipelajari, sehingga dapat menemukan pemecahan masalah yang dihadapi. Hal ini didukung oleh kegigihan siswa yang ditunjukkan dalam wawancara.

Selain itu, siswa menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengetahui lebih banyak tentang dirinya dan lingkungannya atau hal yang menarik baginya (Asri et al., 2020). Terbukti dari hasil wawancara, dimana siswa menunjukkan keinginannya untuk mengetahui materi pembelajaran dengan baik khususnya. Jawaban yang diberikan siswa dan sikap yang ditunjukkan siswa saat wawancara mencerminkan reaksi positif siswa terhadap segala hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran dan biaya pendidikan yang bersifat gratis (Umar, 2018). Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Slameto bahwa bahwa minat adalah suatu rasa lebih dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana BOS di SMA Negeri 1 Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat sudah mengacu pada ketentuan sebagaimana mestinya yaitu untuk administrasi penerimaan siswa baru, pembelian buku referensi, pembelian buku teks pelajaran untuk perpustakaan, membiayai kegiatan remedial, pengayaan dan ekstra kurikuler, membiayai ujian dan laporan hasil belajar siswa, beli bahan habis pakai, membayar langganan daya dan jasa, biaya perawatan sekolah, membayar honorarium guru honor dana tenaga kependidikan honorer, biaya pengembangan profesi guru, biaya administrasi pengelolaan BOS, pembelian komputer dan lainnya (konsumsi rapat dll).

Dana BOS bertujuan untuk meringankan beban orang tua dalam pendidikan, terlebih bagi orang yang tidak mampu. Jika di sekolah terdapat siswa miskin, maka pihak sekolah bisa mengalokasikan dana BOS untuk membantu siswa yang miskin tersebut (Satrio & Meirinawati, 2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan biaya pendidikan gratis sangatlah membantu siswa dalam belajar ketika di sekolah maupun di rumah. Dengan Biaya pendidikan gratis siswa dapat berkonsentrasi dalam belajar dan rajin untuk berangkat ke sekolah (Hamid, 2012). Selain itu, minat belajar siswa dalam proses pembelajaran sangatlah baik, hal ini terlihat dalam proses pembelajaran dan antusias siswa untuk mengetahui dan memahami dengan baik materi yang disampaikan oleh guru di kelas.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sarankan yakni (1) diharapkan kepada pihak sekolah untuk lebih memberikan transparansi kepada orang tua tentang penggunaan dana BOS, sehingga orang tua dapat memahami dengan baik tentang dana BOS serta manfaatnya, dan (2) penelitian ini terbatas pada minat belajar siswa yang ditinjau dari segi biaya pendidikan, sehingga diharapkan kepada peneliti lain untuk dapat melaksanakan penelitian lanjutan dalam konteks yang lebih luas.

REFERENSI

- Airlanda, G. S. (2016). Analisis Kualitas Pendidikan Ditinjau Dari Penerapan Kebijakan Sekolah Gratis Di Sma Negeri 1 Weru Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Pendidikan Sains (Jps)*, 4(1), 43–50.
- Anam, K. (2015). Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pai Di Smp. *Tadarus: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2).
- Ananda, R., Rifa'i, M., & Nasution, J. M. (2022). Pengaruh Minat Belajar dan Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam. *Jurnal Basicedu*, 6(1), 1177–1184. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.2111>
- Anas, A. Y., Riana, A. W., & Apsari, N. C. (2015). Desa Dan Kota Dalam Potret Pendidikan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 418–422. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13592>
- Anum, A., & Novalia, N. (2021). Peningkatan Kualitas Pendidikan Siswa Melalui Bimbel Bahasa Inggris Gratis Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 2(01), 60–66. <https://doi.org/10.24967/jams.v2i01.1246>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2012). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Asri, A. F., Hanief, M., & Sufiyana, Z. A. (2020). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Melalui Pembelajaran Online Kelas XI Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran di Sekolah Menengah Kejuruan Ardjuna 01 Malang. *Pendidikan Islam*, 5(9), 73–78.
- Citra, D. E. (2017). Implementasi Program Pendidikan Gratis Pada Jenjang Pendidikan Dasar Di Kota Bengkulu. *MANHAJ Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 6(2), 1–8.

- Febriyanti, I. (2016). Pendidikan Gratis Dan Kesadaran Pendidikan Pada Masyarakat Di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Jurnal Sosialisasi*, 53(9), 1689–1699.
- Haba, R. (2020). Reformasi Pendidikan Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 7(1), 102. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v7i1.13416>
- Hamid, S. A. (2012). Persepsi Orang Tua Siswa Dan Guru Tentang Pendidikan Dasar Gratis. *Jurnal Papatuzdu*, 4(1), 30–44. <http://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/pepatuzdu/article/view/3>
- Hayati, N., & Harianto, F. (2017). Hubungan Penggunaan Media Pembelajaran Audio Visual dengan Minat Peserta Didik pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Bangkinang Kota. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 14(2), 160–180. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2017.vol14\(2\).1027](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2017.vol14(2).1027)
- Jamaluddin, J. (2019). MINAT BELAJAR (Tinjauan Guru Pendidikan Agama Islam). *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 1(1), 14–23. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v1i1.56>
- Kartika, S., Husni, H., & Millah, S. (2019). Pengaruh Kualitas Sarana dan Prasarana terhadap Minat Belajar Siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(1), 113. <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i1.360>
- Maharani, W. M., & Sukardi. (2016). KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS BAGI MASYARAKAT KOTA BLITAR (Studi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 8 Tahun 2015). *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v1i2.441>
- Muhdi, M., Kastawi, N. S., & Widodo, S. (2017). Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 135. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p135-145>
- Musayyidi, M. (2020). Menyoal Komersialisasi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kariman*, 8(1), 125–140. <https://doi.org/10.52185/kariman.v8i1.134>
- ROLOS, M. C., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *JAP*, VIII(113), 12–20.
- Sadia, H., Mustari, N., Nurmaeta, S., & Razak, F. S. H. (2019). *Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis Di Kabupaten Bone*. 1(April), 39
- Safitri, A. (2019). *Pengaruh pendidikan gratis terhadap motivasi belajar siswa SMP Kelas VIII di kecamatan Simpang Hilir*. 10.
- Satrio, A. B., & Meirinawati. (2016). *Strategi Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Blitar dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Blitar*. 4(6), 1–10.
- Sugiyono. (2013). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (20th ed.). Alfabeta.
- Suyahman. (2016). Analisis Kebijakan Pendidikan Gratis di Sekolah Menengah Atas dalam Kaitannya dengan Kualitas Pendidikan Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaran*, 6(2), 1047–1054.
- Umar, M. A. (2018). Implementasi Kebijakan Program Kesehatan dan Pendidikan Gratis di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008-2014. *Genta Mulia*, IX(1), 23–34.
- Wartoyo, F. X. (2016). Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 216–230. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8734>
- Yuliana, R., Widayati, Wiwik, T., & Taufiq, A. (2015). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Gratis pada Jenjang Sekolah Menengah di Kabupaten Sukoharjo. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(3), 261–270.